

Aksi Kamisan, Wadah Penyatu Gerakan

OLEH USMAN HAMID

Sebuah protes bernama *Aksi Kamisan* telah digelar rutin sebanyak 500 kali di depan Istana Merdeka. Lebih dari sekadar pelaksanaan hak korban untuk protes atas kasus-kasus HAM masa lalu, protes selama 10 tahun ini telah melahirkan generasi baru pembela HAM yang melanjutkan perjuangan mereka, menjadi wadah penyatuan aktor gerakan yang memanfaatkan Kamisan sebagai “amplifier politik” mereka khususnya dalam membela masyarakat yang terkena kasus-kasus HAM terkini. *Kamisan* ini telah memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan. Yang terakhir adalah penghargaan AJI bernama Suardi Tasrif 2017 (7/8). Meski semakin mendapat pengakuan masyarakat, *Kamisan* belum juga memperoleh perhatian serius lembaga-lembaga tinggi negara.

Banyak studi telah mengulas *Kamisan* Argentina, tapi sedikit tentang *Kamisan* di Indonesia. Salah satunya adalah Ken Setiawan (2015). Ia berargumen, *Kamisan* memiliki signifikansi politik. Konsistensi dan persistensinya menyebar ke pusat-pusat kekuasaan; digelar di depan Istana Merdeka, di depan kantor Gubernur Jawa Barat, di samping kantor DPRD dan Walikota Batam, di depan Balai Kota Malang, di Tugu Jogjakarta yang identik dengan kesultanan, hingga di Taman Apsari, Grahadi Surabaya, Jawa Timur. Pilihan lokasi yang merepresentasikan pusat kekuasaan, kata Setiawan, menekankan negara bertanggungjawab atas kasus-kasus HAM sekaligus menghadap-hadapkan pemangku kewajiban (*duty bearers*) dengan pemegang hak (*rights holders*) yang berlokasi di ruang publik sehingga terlihat kasat-mata.

Penjelasan Setiawan ini menolong kita memahami signifikansi *Kamisan*. Apalagi, kata Setiawan, signifikansi politik *Kamisan* terlihat pada tuntutan mereka yang bukan hanya kasus HAM masa lalu, tapi juga membawa beragam pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh Indonesia yang membentang 50 tahun. *Kamisan*, demikian bagi Setiawan, mentransformasikan kisah pengalaman perorangan ke dalam sebuah diskursus politik. Namun demikian, yang luput dari observasi Setiawan atau yang perlu diperkuat dari penjelasan Setiawan adalah mengapa dan bagaimana *Kamisan* dapat bertahan begitu lama.

Kamisan, pertama kali digelar pada 18 Januari 2007, bermula dari pencarian strategi baru di tengah pudarnya respon pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kasus HAM masa lalu. *Kamisan* terinspirasi dari *Madres de Plaza de Mayo*, ibu-ibu yang berbaris diam tiap Kamis di depan Casa Rosada, Istana Kepresidenan Argentina sejak Maret 1977 hingga setidaknya 2006. Ibu-ibu ini selalu membawa foto anak-anak mereka yang dihilangkan paksa rezim militer selama 1976-1983. Mereka menuntut kejelasan anak-anaknya serta menolak pengampunan tanpa penuntutan. Beberapa pencetus Aksi sempat diculik dan dibunuh, tapi mereka tak pernah menyerah hingga akhirnya membuahkan hasil: Kongres dan Mahkamah Agung

menghapuskan UU Pengampunan (2003) dan pelaku-pelaku diadili dan dinyatakan bersalah (2006). *Madres* lalu mengumumkan akhir dari *March of Resistance* mereka seiring langkah Presiden Néstor Kirchner membersihkan pelanggar HAM dari jabatan pemerintahan.

Generasi Muda Pembela HAM

“Jadi mau sampai 1000 kali, 5000 kali, kita akan memastikan aksi ini berjalan terus. Sampai suatu hari nanti. Sampai pemerintahan kita bersih dari orang-orang yang punya catatan hitam,” kata Ananda Badudu saat berorasi di hadapan sekitar 40 orang pemuda yang menggelar *Kamisan* Bandung yang pada medio Juli lalu telah berjalan sebanyak 200 kali di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (27/7).

Berlatarbelakang jurnalis, Ananda adalah musisi muda (29 tahun) dari duo bersama Rara Sekar di bawah bendera “Banda Neira.” Perhatian keduanya pada kemanusiaan tercermin pada sebagian karya mereka yang menceritakan penyair yang dihilangkan seperti Wiji Thukul, atau membahasakan syair Chairil Anwar hingga pemikiran Albert Camus melalui musik (Basuki 2016). Jika Ananda meramaikan *Kamisan* di Bandung, maka di hari yang sama musisi Efek Rumah Kaca (ERK) yang dipelopori oleh Cholil Mahmud tampil meramaikan *Kamisan* ke-500 di Jakarta.

Orasi Ananda menunjuk satu persoalan serius, yaitu masih adanya orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM masa lalu dalam kekuasaan negara. Nanda menegaskan, “Kita tak mau orang-orang yang tak menghargai hak hidup, hak berpendapat, lalu dengan mudahnya menguasai perekonomian negara, dan menjabat posisi-posisi penting negara.” Dia mungkin tengah berandai-andai ketika menyebut angka 1000 kali, 5000 kali. Dia benar. Ini bukan soal kecil yang bisa diselesaikan melalui sekali protes. Tapi haruskah *Kamisan* mencapai 1000 atau 5000 kali agar tuntutan mereka dipenuhi dan orang-orang yang punya catatan hitam itu tak lagi dalam kekuasaan?

Dalam orasinya pun Nanda mengajak peserta berefleksi “Kenapa pula kita masih terus-terusan sampai 500 minggu (di Jakarta), 200 pekan (di Bandung)? Ini suatu hal yang patut kita renungkan bersama. Jika yang berkuasa orang-orang seperti itu sampai kapan hak-hak hidup ini bisa dihormati? Siapa yang ingin memiliki penguasa yang terlibat dalam kasus-kasus penembakan mahasiswa? Kalau kita tidak berkumpul setiap hari Kamis, mungkin tidak ada lagi pengingat,” kata Ananda.

Jumlah 500 kali *Kamisan* bukan hal sepele. Ia telah digelar sebanyak 500 hari dalam 500 pekan. Andai digelar setiap hari, itu sama artinya berlangsung selama 1,5 tahun. Bila setiap Aksi terdapat 15-25 pemuda maka sekitar 7,500 sampai 12,500 pemuda telah meramaikan *Kamisan*. Begitu pula *Kamisan* Bandung. Jumlah 200 kali bukan perkara kecil. Mereka jauh dari pusat kota dan pemberitaan media. Jika setiap aksi dihadiri oleh

10 pemuda, maka jumlah partisipasinya mencapai 2000 pemuda. Data sesungguhnya bisa lebih.

Sumbangsih mereka beragam, dari seni musik dan puisi, menjadi panitia bergantian dan menuliskan ratusan surat *Kamisan* kepada Presiden, menyebarluaskan di jejaring media sosial hingga menjadikannya sebagai tugas akhir kampus. Meski tetap terdapat simbol korban yang telah berusia seperti Sumarsih, Bejo Untung dan Suciwati, segala persiapan teknis *Kamisan* kini dikelola pemuda. Dalam Sumarsih dan Suciwati, *Kamisan* menjadi perlambang kesetiaan dan keteguhan ibu dalam mencintai anggota keluarga mereka yang ditembak atau dibunuh. Dalam Nanda dan Cholil, *Kamisan* telah melahirkan generasi baru pembela HAM Indonesia.

Amplifier Politik Masyarakat

“Hidup Korban? Jangan Diam! Jangan Diam? Lawan! Jokowi? Hapus Impunitas!” adalah slogan yang kerap terdengar pada *Kamisan*. Pada mulanya, mereka menuntut Presiden untuk menuntaskan hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM ke Pengadilan HAM ad hoc. Di antaranya meliputi tujuh berkas perkara: tragedi Trisakti, Semanggi I-II, Mei 1998, Lampung 1989, penculikan aktivis 1997/1998, Petrus 1980an, Wamena dan Wasior Papua pada 2000an, hingga tragedi 1965/1966. Mereka juga menuntut dituntaskannya kasus pembunuhan Munir 2004.

Seiring waktu, *Kamisan* juga menyoroti isu-isu lintas sektoral, dari pelanggaran hak-hak sipil-politik (kebebasan) hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya (pembangunan). Petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, juga pemegang Suardi Tasrif Award 2017, pernah menyalurkan protes mereka melalui “aksi menyemen kaki” di *Kamisan* dan membawa mereka bertemu Presiden Jokowi. Jaringan Buruh Migran menyalurkan tuntutan pembatalan eksekusi mati seorang buruh migran perempuan, Merri Utami. Ada banyak lagi. *Kamisan*, singkatnya, telah menjadi “amplifier politik” beragam kelompok yang menuntut keadilan. *Kamisan* telah mewadahi protes masyarakat dari berbagai daerah yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan.

Benar kata Ananda. “*Kamisan* ini adalah aksi saling menguatkan, saling bertemu, lintas organisasi, lintas kampus, dan bertemu dengan orang-orang memiliki pemikiran yang sama, mimpi yang sama, tentang ketidakadilan, tentang bagaimana negara dikuasai oleh orang-orang yang punya beban masa lalu yang berdarah-darah.”

Mungkin inilah sebabnya *Kamisan* sempat dilarang dua kali pada era SBY dan sekali pada era Jokowi. Pada medio November 2015, misalnya, pihak kepolisian mengabari Sumarsih bahwa *Kamisan* tak lagi diizinkan karena dinilai melanggar Undang-Undang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Larangan ini terdengar aneh karena terjadi di dua era pemerintahan yang berjanji menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Larangan pemerintah ketika *Kamisan* telah berlangsung lama hanya

menunjukkan negara khawatir bahwa *Kamisan* mulai melahirkan suatu kebenaran baru (counter-narratives) melalui sebuah mobilisasi kekuatan sosial yang mengganggu status quo.

Meski pernah dilarang, *Kamisan* tetap berjalan. “Semakin saya dekat dengan Istana, Presiden semakin mendengar dan menindaklanjuti. Kalau jauh, semakin diabaikan,” kata Sumarsih. Persis sebuah keberadaan fisik inilah yang juga diinginkan ibu-ibu di Argentina, sehingga tak ada alasan bagi pemerintah untuk pura-pura tidak melihat mereka dan mendengar tuntutan mereka. *Kamisan* bukan lagi sekadar manifestasi dari pelaksanaan hak korban untuk protes. Ia telah melahirkan generasi baru pembela HAM dan menjadi “amplifier politik” masyarakat tertindas. Lebih jauh, aksi ini bisa menjadi wadah pemersatu aktor-aktor gerakan HAM.